



DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN 2013



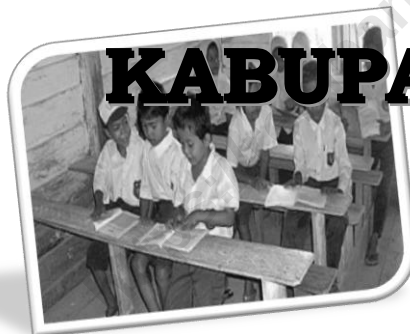
KABUPATEN REMBANG



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN REMBANG**



DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN 2013



KABUPATEN REMBANG



DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATEN REMBANG 2013

ISBN : 978-602-71014-5-6
Nomor Publikasi : 33172.1501
Katalog BPS : 3205008.3317
Ukuran Buku : A4 (8,27 inch x 11,69 inch)
Jumlah Halaman : vii + 56 halaman

Naskah :

Seksi Statistik Sosial

Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang

Pengarah : Muh. Saichudin, S.Si, M.Si

Penanggung Jawab : Muh. Saichudin, S.Si, M.Si

Penyunting : Khaerul Anwar, S.S.T

Penulis : Faisal Luthfi Arief, S.S.T

Gambar Kulit :

Faisal Luthfi Arief, S.S.T

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

ABSTRAKSI

Kemiskinan di Kabupaten Rembang, masih menjadi isu strategis dalam pembangunan selain pengangguran. Oleh karena itu informasi tentang kemiskinan sangat penting bagi kelancaran evaluasi dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Rembang.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2013 mencapai 128,0 ribu orang (20,97 persen), menurun bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 129,9 ribu orang (21,88 persen). Persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang pada tahun 2013 berada di peringkat 3 (tiga) tertinggi se-Propinsi Jawa Tengah. Di wilayah eks Karesidenan Pati, persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang tertinggi di antara 5 (lima) kabupaten yang ada.

Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang pada periode 2009-2013 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp. 284.160,- per kapita per bulan, meningkat jika dibandingkan tahun 2012 (Rp. 261.156,-).

Pada periode tahun 2012-2013 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) naik dari 2,76 menjadi 3,40, mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Rembang semakin menjauhi Garis Kemiskinan. Pada periode yang sama, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat dari 0,60 menjadi 0,88, menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin pada tahun 2013 melebar dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara umum, keadaan penduduk miskin pada sektor pendidikan dan kesehatan mengalami penurunan pada tahun 2013. Hal yang sama terjadi pada sektor ketenagakerjaan. Penduduk miskin yang tidak bekerja meningkat dari 32,38 persen pada tahun 2012 menjadi 33,08 persen pada tahun 2013.

Untuk rumah tangga miskin, persentase rumah tangga miskin yang menggunakan air bersih dan jamban sendiri/bersama mengalami penurunan. Sedangkan yang menempati luas lantai per kapita $\leq 8 \text{ m}^2$ justru meningkat. Hal yang sama terjadi pada rumah tangga penerima raskin.

Kenaikan bahan bakar premium dan solar, tarif resmi angkutan umum dan tarif dasar listrik pada tahun 2013 tidak terlalu berpengaruh pada kelompok penduduk yang berpendapatan menengah ke atas. Sedangkan pada kelompok penduduk berpenghasilan rendah, kenaikan harga ataupun tarif dari 3 (tiga) komponen tersebut cukup berpengaruh. Hal demikian terlihat pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang semakin tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia, tak terkecuali Indonesia. Persoalan yang sama juga menjadi fokus perhatian pemerintah dan masyarakat Provinsi Jawa Tengah, termasuk di Kabupaten Rembang. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik menyajikan data dan informasi yang berkaitan dengan kemiskinan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2013 yang merupakan kelanjutan publikasi sebelumnya.

Publikasi ini berisi tentang data dan informasi mengenai kemiskinan dan indikator serta variabel lain yang terkait dengan masalah kemiskinan di Kabupaten Rembang. Data yang disajikan merupakan hasil penghitungan Susenas Triwulan I – IV Tahun 2013. Agar dapat diamati perkembangannya, disajikan pula beberapa data dari Susenas tahun-tahun sebelumnya.

Dengan terbitnya publikasi ini diharapkan sebagian kebutuhan data, khususnya yang terkait dengan masalah kemiskinan dapat terpenuhi. Semoga publikasi ini bermanfaat, terutama bagi pengambil kebijakan dan semua pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kepada semua pihak yang telah membantu sehingga publikasi ini diterbitkan diucapkan terimakasih.

Rembang, Februari 2015

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN REMBANG
KEPALA,



MUH. SAICHUDIN, S.Si, M.Si
NIP. 19710907 199211 1 001

DAFTAR ISI

Abstraksi	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran.....	vii
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penulisan	1
1.3. Sumber Data	2
1.4. Sistematika Penulisan	2
 BAB II. KAJIAN PUSTAKA	 4
2.1. Pengeluaran	4
2.2. Pendapatan	4
2.3. Definisi Kemiskinan	4
2.3.1. Kemiskinan Relatif	5
2.3.2. Kemiskinan Absolut	5
2.4. Terminologi Kemiskinan	6
2.4.1. Pendekatan Pendapatan/Pengeluaran	8
2.4.2. Rata-Rata per Kapita	9
2.5. Pendekatan BKKBN	11
2.6. Pendekatan Kriteria Penduduk Miskin BPS	11
2.7. Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 (PPLS2011)	13
 BAB III. METODOLOGI	 15
3.1. Metode Penghitungan	15
3.2. Indikator Kemiskinan	15
3.3. Konsep dan Definisi	16

BAB IV. KEMISKINAN DI KABUPATEN REMBANG	20
4.1. Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Rembang	20
4.2. Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang.....	23
4.3. Ukuran Indeks Kemiskinan di Kabupaten Rembang	24
 BAB V. KARAKTERISTIK PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN REMBANG	26
5.1. Pendidikan.....	26
5.2. Ketenagakerjaan.....	29
5.3. Kesehatan.....	31
BAB VI. KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN REMBANG	34
6.1. Pengeluaran Per Kapita Per Bulan	34
6.2. Fasilitas Perumahan	35
6.3. Program Pemerintah	37
 BAB VII. KESIMPULAN DAN PENUTUP	40
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Beberapa Kriteria dan Garis Kemiskinan	10
-----------	--	----

<https://rembangkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Rembang Tahun 2009-2013.....	20
Gambar 4.2	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Rembang Tahun 2009-2013.....	21
Gambar 4.3	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....	22
Gambar 4.4	Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang Tahun 2009-2013.....	23
Gambar 4.5	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Rembang Tahun 2009-2013	25
Gambar 5.1	Persentase Penduduk Miskin Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Rembang Tahun 2009-2013.....	27
Gambar 5.2	Angka Melek Huruf Penduduk Miskin Kelompok Umur 15-24 Tahun dan 15-55 tahun di Kabupaten Rembang Tahun 2009-2013.....	28
Gambar 5.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Miskin Menurut Golongan Umur di Kabupaten Rembang Tahun 2009-2013	29
Gambar 5.4	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Pekerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2009-2013.....	30
Gambar 5.5	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Bekerja di Kabupaten Rembang Tahun 2009-2013	31
Gambar 5.6	Persentase Balita di Rumah Tangga Miskin yang Proses Kelahirannya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Rembang Tahun 2009-2013.....	32
Gambar 5.7	Persentase Balita di Rumah Tangga Miskin yang Telah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Rembang Tahun 2009-2013.....	33
Gambar 6.1	Persentase Per Kapita untuk Makanan Menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Kabupaten Rembang Tahun 2009-2013	34

Gambar 6.2	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Bersih dan Jamban Sendiri/Bersama di Kabupaten Rembang Tahun 2009-2013	36
Gambar 6.3	Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Luas Lantai Per Kapita di Kabupaten Rembang Tahun 2009-2013	37
Gambar 6.4	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Askeskin/Jamkesmas di Kabupaten Rembang Tahun 2009-2013	38

<https://rembangkab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang, 2007-2013.....	45
Tabel 2.	Persentase Penduduk Miskin Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Rembang Tahun, 2007-2013.....	46
Tabel 3.	Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Miskin Menurut Golongan Umur di Kabupaten Rembang, 2007-2013	47
Tabel 4.	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 ke Atas Menurut Sektor Bekerja di Kabupaten Rembang, 2007-2013	48
Tabel 5.	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 ke Atas Menurut Status Bekerja di Kabupaten Rembang, 2007-2013	49
Tabel 6.	Persentase Balita diRumah Tangga Miskin yang Telah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Rembang, 2007-2013	50
Tabel 7.	Persentase Perempuan Pengguna Alat KB dan Persentase Balita diRumah Tangga Miskin yang Proses Kelahirannya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Rembang, 2007-2013.....	51
Tabel 8.	Persentase Per Kapita untuk Makanan Menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Kabupaten Rembang, 2007-2013.....	52
Tabel 9.	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Kabupaten Rembang, 2007-2013	53
Tabel 10.	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama Menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Kabupaten Rembang, 2007-2013.....	54
Tabel 11.	Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Luas Lantai Per Kapita di Kabupaten Rembang, 2009-2013.....	55
Tabel 12.	Persentase Rumah Tangga yang Pernah Membeli Beras Raskin, Rata-rata Jumlah Beras Raskin dan Harga yang Dibeli oleh Rumah Tangga pada Quantile 1 di Kabupaten Rembang, 2008-2013.....	56

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus menerus. Bukan saja karena masalah ini telah ada sejak dahulu kala, melainkan pula karena masalah ini masih hadir hingga kini di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Kabupaten Rembang, kemiskinan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan selain pengangguran. Oleh karena itu informasi tentang kemiskinan sangat penting bagi kelancaran evaluasi dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Rembang.

Kemiskinan menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dan kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan pangan, perumahan, sandang, pekerjaan, dan sebagainya. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat pula digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini antara lain untuk :

- a. Mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Rembang tahun 2013.
- b. Mengetahui karakteristik penduduk dan rumah tangga miskin di Kabupaten Rembang tahun 2013.

Dalam penulisan ini disajikan juga series data, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan monitoring dan evaluasi masalah kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Rembang. Dengan tersedianya series data tersebut, perencana dan pengambil kebijakan program pembangunan di Kabupaten Rembang dapat menyusun program penanggulangan kemiskinan lebih baik.

1.3. Sumber Data

Sumber data berdasarkan gabungan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Triwulan I-IV Tahun 2013. Untuk mendukung penulisan dalam publikasi ini disertakan juga hasil SUSENAS tahun-tahun sebelumnya. Pengumpulan data dari rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden.

1.4. Sistematika Penulisan

Tulisan ini disusun dalam 7 (tujuh) bab, yaitu :

- Bab I. Pendahuluan**, berisi latar belakang penulisan, tujuan penulisan dan sistematika penulisan.
- Bab II. Kajian Pustaka**, menjelaskan tentang kajian literatur/pustaka sebagai khasanah ilmu pengetahuan sekaligus diperkaya dengan hasil penelitian dan pengembangan metodologi terbaru yang sudah dipublikasikan.
- Bab III. Konsep dan Metodologi**, menjelaskan tentang metode penghitungan serta indikator kemiskinan yang mencakup tentang persentase penduduk miskin, ukuran kedalaman kemiskinan, ukuran keparahan kemiskinan serta konsep dari beberapa istilah berbagai sektor.
- Bab IV. Kemiskinan**, membahas tentang perkembangan kemiskinan, garis kemiskinan, ukuran indeks kemiskinan, gini ratio dan kriteria Bank Dunia di Kabupaten Rembang.
- Bab V. Karakteristik Penduduk Miskin**, membahas tentang jumlah dan persentase penduduk miskin di sektor pendidikan, ketenagakerjaan dan kesehatan.

- Bab VI. Karakteristik Rumah Tangga Miskin,** membahas tentang profil rumah tangga miskin menurut karakteristiknya.
- Bab VII. Kesimpulan dan Penutup,** berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan penutup.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengeluaran

Pengeluaran rumah tangga sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua kelompok yaitu konsumsi makanan dan bukan/non makanan (perumahan, aneka barang dan jasa, pendidikan, kesehatan, pakaian, barang tahan lama, pajak dan asuransi, dan keperluan untuk pesta dan upacara). Konsumsi tersebut tanpa memperhatikan asal barang (membeli atau hasil sendiri atau pemberian) dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha rumah tangga atau diberikan kepada pihak lain.

2.2. Pendapatan

Pendapatan adalah penerimaan berupa uang maupun barang yang diterima atau dihasilkan. Namun disadari, bahwa informasi pendapatan ini tidak seperti yang diharapkan, dimana banyak responden cenderung memberikan informasi pendapatan yang tidak sebenarnya. Oleh sebab itu, data pendapatan sendiri diperkirakan dari data pengeluaran dengan asumsi bahwa pengeluaran masyarakat merupakan gambaran dari pendapatan mereka.

2.3. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Hak-hak dasar antara lain (a). terpenuhinya kebutuhan pangan, (b). kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (c). rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindakan kekerasan, (d). hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

2.3.1. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu daerah pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 40 persen dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti “sepanjang masih ada kehidupan, orang miskin akan selalu hadir bersama kita”.

Dalam praktek, negara kaya mempunyai garis kemiskinan relatif yang lebih tinggi dari pada negara miskin seperti pernah dilaporkan oleh *Ravallion* (1998 : 26). Paper tersebut menjelaskan “mengapa”, misalnya, angka kemiskinan resmi (*official figure*) pada awal tahun 1990-an mendekati 15 persen di Amerika Serikat dan juga mendekati 15 persen di Indonesia (negara yang jauh lebih miskin). Artinya, banyak dari mereka yang dikategorikan miskin di Amerika Serikat akan tetapi dikatakan sejahtera menurut standar Indonesia.

Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif “cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan”. Garis kemiskinan cenderung tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar daerah dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

2.3.2. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum dari kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan

istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan absolut adalah “tetap/tidak berubah” dalam hal standar hidup. Garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan Amerika Serikat tidak berubah dari tahun ke tahun, sehingga angka kemiskinan sekarang mungkin terbanding dengan angka kemiskinan satu dekade yang lalu, dengan catatan bahwa definisi kemiskinan tidak berubah.

Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang akan mencoba menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit skala kecil). *Angka kemiskinan akan terbanding antara satu negara dengan negara lain hanya dan jika garis kemiskinan absolut yang sama digunakan di kedua negara tersebut.* Bank Dunia memerlukan garis kemiskinan absolut agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan kemana menyalurkan sumber daya finansial (dana) yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan. Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia, yaitu : a) PPP (*Purchasing Power Parity*)/Paritas Daya Beli US \$ 1 per hari, dengan batasan ini diperkirakan ada sekitar 1,2 miliar penduduk dunia yang hidup dibawah ukuran tersebut; b) PPP (*Purchasing Power Parity*)/Paritas Daya Beli US \$ 2 per hari yang diperkirakan lebih dari 2 miliar penduduk yang hidup kurang dari batas tersebut. Kedua batas ini adalah garis kemiskinan absolut.

2.4. Terminologi Kemiskinan

Terminologi lain yang juga pernah dikemukakan sebagai wacana adalah kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan Struktural: Masalah dan Kebijakan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan “Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan”. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak

hanya menerbitkan akan tetapi (lebih lanjut dari itu) juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. Di dalam kondisi struktur yang demikian itu kemiskinan menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau oleh sebab-sebab yang pribadi, melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tidak adil. Tatanan yang tidak adil ini menyebabkan banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang dan/atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya. Hal tersebut menyebabkan mereka yang malang dan terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil ini menjadi serba berkekurangan, tak setara dengan tuntutan untuk hidup yang layak dan bermartabat sebagai manusia. Salah satu contoh adalah kemiskinan karena lokasi tempat tinggal yang terisolasi, misalnya, orang Mentawai di Kepulauan Mentawai, orang Melayu di Pulau Christmas, Suku Tengger di Pegunungan Tengger Provinsi Jawa Timur, dan sebagainya.

Sedangkan kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya dari suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut seyogyanya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kemiskinan karena tradisi sosio-kultural terjadi pada suku-suku terasing, seperti halnya Suku Badui di Cibeo Banten Selatan, Suku Dayak di pedalaman Pulau Kalimantan, dan suku Kubu di Provinsi Jambi.

Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan, Kebudayaan, dan Gerakan Membudayakan Keberdayaan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan “Kemiskinan adalah suatu ketidakberdayaan”. Keberdayaan itu sesungguhnya merupakan fungsi kebudayaan. Artinya, berdaya tidaknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakatnya itu dalam kenyataan akan banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh determinan-determinan sosial-budayanya (seperti misalnya posisi, status, dan wawasan yang dipunyainya). Sebaliknya, semua fasilitas sosial yang dicapai dan dapat didayagunakan olehnya itu akan ikut pula menentukan keberdayaannya kelak di dalam pengembangan dirinya di tengah masyarakat.

Acapkali timbul suatu rasa pesimis di kalangan orang miskin dengan merasionalisasi keadaannya bahwa hal itu “sudah takdir”, dan bahwa setiap orang itu sesungguhnya sudah mempunyai suratan nasibnya sendiri-sendiri, yang mestinya malah harus disyukuri. Oleh karena itu, Soetandyo menyarankan ditingkatkannya “Gerakan Membudayakan Keberdayaan” pada lapisan masyarakat bawah. Melek huruf, melek bahasa, melek fasilitas, melek ilmu, melek informasi, melek hak, dan melek-melek lainnya adalah suatu keberdayaan yang harus terus dimungkinkan kepada lapisan-lapisan masyarakat bawah agar tidak terjebak ke dalam kemiskinan kultural.

2.4.1. Pendekatan Pendapatan/Pengeluaran

Strategi kebutuhan dasar (*basic needs*), sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981: 29), dipromosikan dan dipopulerkan oleh *International Labor Organisation* (ILO) pada tahun 1976 dengan judul “Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kebutuhan Dasar: Suatu Masalah bagi Satu Dunia”. Strategi kebutuhan dasar memang memberi tekanan pada pendekatan langsung dan bukan cara tidak langsung seperti melalui efek menetes ke bawah (*trickle-down effect*) dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kesulitan umum dalam penentuan indikator kebutuhan dasar adalah standar atau kriteria yang subjektif karena dipengaruhi oleh adat, budaya, daerah, dan kelompok sosial. Demikian pula kesulitan penentuan secara kuantitatif dari masing-masing komponen kebutuhan dasar karena dipengaruhi oleh sifat yang dimiliki oleh komponen itu sendiri, seperti misalnya selera konsumen terhadap suatu jenis makanan atau komoditi lainnya.

Beberapa kelompok atau ahli telah mencoba merumuskan mengenai konsep kebutuhan dasar ini termasuk alat ukurnya. Konsep kebutuhan dasar yang dicakup adalah komponen kebutuhan dasar dan karakteristik kebutuhan dasar serta hubungan keduanya dengan garis kemiskinan. Rumusan komponen kebutuhan dasar menurut beberapa ahli adalah :

1. Menurut *United Nations* (1961), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986: 289), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: kesehatan, bahan

makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial, dan kebebasan manusia.

2. Menurut UNSRID (1966), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986: 289), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) kebutuhan fisik primer yang mencakup kebutuhan gizi, perumahan, dan kesehatan; (ii) kebutuhan kultural yang mencakup pendidikan, rekreasi dan ketenangan hidup; dan (iii) kebutuhan atas kelebihan pendapatan.
3. Menurut Ganguli dan Gupta (1976), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986: 289), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: gizi, perumahan, pelayanan kesehatan pengobatan, pendidikan, dan sandang.
4. Menurut Green (1978), sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981:31), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) *personal consumption items* yang mencakup pangan, sandang, dan pemukiman; (ii) *basic public services* yang mencakup fasilitas kesehatan, pendidikan, saluran air minum, pengangkutan, dan kebudayaan.
5. Menurut Hendra Esmara (1986: 320-321), komponen kebutuhan dasar primer untuk bangsa Indonesia mencakup pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
6. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), komponen kebutuhan dasar terdiri dari pangan dan bukan pangan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

2.4.2. Rata-rata per Kapita

Pendekatan rata-rata per kapita yang diterapkan dalam penghitungan kemiskinan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Biasanya pendekatan rata-rata per kapita ini belum mempertimbangkan tingkat konsumsi menurut golongan umur dan jenis kelamin serta skala ekonomi dalam konsumsi. Bahkan ada juga pengukuran secara internasional dengan menggunakan nilai uang dalam bentuk dolar. Bank dunia menetapkan garis kemiskinan sebesar 1 dolar dalam bentuk satuan "PPP" per kapita per hari. Sedangkan negara maju seperti Eropa Barat menetapkan 1/3 dari nilai PDB per kapita per tahun sebagai garis

kemiskinan. Untuk kasus Indonesia, garis kemiskinan didekati dengan pengeluaran minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari ditambah pengeluaran minimum bukan makanan (perumahan dan fasilitasnya, sandang, kesehatan, pendidikan, transpor dan barang-barang lainnya).

Tabel 2.1 Beberapa Kriteria dan Garis Kemiskinan

No.	Penelitian	Kriteria	Garis Kemiskinan		
			Desa (D)	Kota (K)	Desa+Kota
1.	Esmara, 1969/1970 *)	Konsumsi beras per kapita per tahun (kg)	-	-	125
2.	Sayogya, 1971 *)	Tingkat pengeluaran ekuivalen beras per orang per tahun (kg) - Miskin (M) - Miskin Sekali (MS) - Paling Miskin (PM)	320 240 180	480 360 270	- - -
3.	Ginneken, 1969 *)	Kebutuhan gizi minimum per orang per hari - Kalori - Protein (gram)	- -	- -	2.000 50
4.	Anne Booth, 1969/1970 *)	Kebutuhan gizi minimum per orang per hari - Kalori - Protein	- -	- -	2.000 40
5.	Gupta, 1973 *)	Kebutuhan gizi minimum per orang per tahun (Rp.)	-	-	24.000
6.	Hasan, 1975 *)	Pendapatan minimum per kapita per tahun (US \$)	125	95	-
7.	BPS	Konsumsi kalori per kapita per hari ditambah konsumsi non makanan	-	-	2.100
8.	Sayogya, 1984 **)	Pengeluaran per kapita per bulan (Rp)	6.585	8.240	-
9.	Bank Dunia	Pengeluaran per kapita per hari (PPP)	-	-	1 \$, 2\$
10.	Garis Kemiskinan Internasional, Interim Report, 1976 **)	Pendapatan per kapita per tahun - Nilai US \$, 1970 - US \$ Paritas Daya Beli (PPP)	- 7.746	- 13.731	75 200

Keterangan:

*) Hendra Esmara : Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia, PT Gramedia, Jakarta: 1986, hlm. 312-316, Tabel 9.2.

**) Kompas, Senin : 9 Mei 1988.

2.5. Pendekatan BKKBN

Salah satu penerapan konsep dan definisi kemiskinan pernah dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 1999 dengan melakukan pendataan keluarga secara lengkap. Hasil dari pendataan keluarga tersebut adalah pentahapan keluarga sejahtera, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III-Plus). Menurut BKKBN kriteria keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin adalah Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I). Ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai Keluarga Sejahtera I, yaitu:

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing.
2. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan 2 kali sehari atau lebih.
3. Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda di rumah, sekolah, bekerja dan bepergian.
4. Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah.
5. Bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB pergi ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern.

Mereka yang dikategorikan sebagai Keluarga Pra-Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator di atas. Pendekatan BKKBN ini dianggap masih kurang realistis karena konsep keluarga Pra Sejahtera dan KS I sifatnya normatif dan lebih sesuai dengan keluarga kecil/inti, disamping ke lima indikator tersebut masih bersifat sentralistik dan seragam yang belum tentu relevan dengan keadaan dan budaya lokal.

2.6. Pendekatan Kriteria Rumah Tangga Miskin BPS

Pada tahun 2000 BPS melakukan Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin (SPKPM 2000) untuk mengetahui karakteristik-karakteristik rumah tangga yang mampu mencirikan kemiskinan secara konseptual (pendekatan kebutuhan dasar/garis kemiskinan). Hal ini menjadi sangat penting karena pengukuran makro

(*basic needs*) tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi rumah tangga/penduduk miskin di lapangan. Informasi ini berguna untuk penentuan sasaran rumah tangga program pengentasan kemiskinan (intervensi program). Hasil dari SPKPM 2000, didapatkan variable-variabel yang mencirikan sifat-sifat kemiskinan. Variabel tersebut adalah:

1. Luas Lantai Perkapita :
 - ☐ $\leq 8 \text{ m}^2$ (skor 1)
 - ☐ $> 8 \text{ m}^2$ (skor 0)
2. Jenis Lantai :
 - ☐ Tanah (skor 1)
 - ☐ Bukan Tanah (skor 0)
3. Air Minum/Ketersediaan Air Bersih :
 - ☐ Air hujan/sumur tidak terlindung (skor 1)
 - ☐ Ledeng/PAM/sumur terlindung (skor 0)
4. Jenis Jamban/WC :
 - ☐ Tidak Ada (skor 1)
 - ☐ Bersama/Sendiri (skor 0)
5. Kepemilikan Asset :
 - ☐ Tidak Punya Asset (skor 1)
 - ☐ Punya Asset (skor 0)
6. Pendapatan (total pendapatan per bulan) :
 - ☐ ≤ 350.000 (skor 1)
 - ☐ > 350.000 (skor 0)
7. Pengeluaran (persentase pengeluaran untuk makanan) :
 - ☐ 80 persen + (skor 1)
 - ☐ < 80 persen (skor 0)
8. Konsumsi lauk pauk (daging, ikan, telur, ayam) :
 - ☐ Tidak ada/ada, tapi tidak bervariasi (skor 1)
 - ☐ Ada, bervariasi (skor 0)

Kedelapan variabel tersebut diperoleh dengan menggunakan *metode stepwise logistic regression* dan *misklasifikasi* yang dihasilkan sekitar 17 persen. Hasil analisis deskriptif dan *uji Chi-Square* juga menunjukkan bahwa kedelapan variabel terpilih tersebut sangat terkait dengan fenomena kemiskinan dengan tingkat kepercayaan sekitar 99 persen. Skor batas yang digunakan adalah 5 (lima) yang didasarkan atas modus total skor dari domain rumah tangga miskin secara konseptual. Dengan demikian apabila suatu rumah tangga mempunyai minimal 5 (lima) ciri miskin maka rumah tangga tersebut digolongkan sebagai rumah tangga miskin.

2.7. Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 (PPLS2011)

Data kemiskinan yang selama ini dihitung dari Susenas merupakan data makro berupa perkiraan penduduk miskin di Indonesia yang hanya dapat disajikan sampai tingkat propinsi/kabupaten. Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 (PPLS2011) dimaksudkan untuk mendapatkan data kemiskinan mikro berupa direktori rumah tangga penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang berisi nama kepala rumah tangga dan alamat tempat tinggal mereka. Berbeda dengan data kemiskinan makro, penentuan rumah tangga penerima BLT pada PPLS2011 didasarkan pada pendekatan karakteristik rumah tangga, bukan dengan pendekatan nilai konsumsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum (*non-monetary approach*).

Adapun indikator yang digunakan ada sebanyak 14 variabel, yaitu :

1. Luas lantai rumah
2. Jenis lantai rumah
3. Jenis dinding rumah
4. Fasilitas tempat buang air besar
5. Sumber air minum
6. Penerangan yang digunakan
7. Bahan bakar yang digunakan
8. Frekuensi makan dalam sehari
9. Kebiasaan membeli daging/ayam/susu
10. Kemampuan membeli pakaian.

11. Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik
12. Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga
13. Pendidikan kepala rumah tangga
14. Kepemilikan aset.

Metode yang digunakan dalam penentuan kategori rumah tangga penerima BLT adalah dengan menggunakan sistem scoring, yaitu setiap variabel diberi skor yang diberi bobot dan bobotnya didasarkan kepada besarnya pengaruh dari setiap variabel terhadap kemiskinan. Jumlah variabel dan besarnya bobot berbeda di setiap kabupaten. Dari bobot masing-masing variabel terpilih untuk tiap kabupaten/kota selanjutnya dihitung indeks skor rumah tangga penerima BLT dari hasil PSE05 dengan formula :

$$I_{RM} = \sum W_i X_i$$

dengan,

W_i = bobot variabel terpilih, dan $\sum W_i = 1$

X_i = nilai skor variabel terpilih (skor 1 untuk jawaban yang mengindikasikan miskin dan skor 0 untuk jawaban yang mengindikasikan tidak miskin).

I_{RM} = indeks rumah tangga penerima BLT, dengan nilai antara 0 dan 1.

Berdasarkan nilai I_{RM} di atas, selanjutnya semua rumah tangga diurutkan dari nilai I_{RM} terbesar sampai terkecil. Semakin tinggi nilai I_{RM} maka semakin miskin rumah tangga tersebut.

BAB III KONSEP DAN METODOLOGI

3.1. Metode Penghitungan

Untuk mengukur kemiskinan, kita menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut pendekatan ini, *Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.*

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), sebagai berikut :

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan, garis kemiskinan non-makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

3.2. Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

- ☐ Pertama, *Head Count Index* (HCI-P₀), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- ☐ Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P₁) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin

terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

- Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P₂*) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

dengan,

α = 0, 1, 2

z = Garis kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,...,q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

Jika $\alpha=0$, diperoleh *Head Count Index* (P_0), jika $\alpha=1$ diperoleh Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P₁*) dan jika $\alpha=2$ disebut Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P₂*).

3.3. Konsep dan Definisi

1. Pendidikan

- a. **Angka melek huruf (AMH)** adalah proporsi seluruh penduduk (miskin + tidak miskin) berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Publikasi ini juga menyajikan angka melek huruf menurut kelompok umur 15–24 tahun dan 15–55 tahun. Melek huruf yang dimaksudkan di sini adalah melek huruf latin dan huruf lainnya.

- b. **Angka partisipasi sekolah (APS)** adalah proporsi dari seluruh penduduk (miskin + tidak miskin) dari berbagai kelompok umur tertentu (7–12 tahun, 13–15 tahun, 16–18 tahun, dan 19–24 tahun) yang masih duduk di bangku sekolah. Publikasi ini hanya menyajikan angka partisipasi sekolah pada kelompok umur 7–12 tahun dan 13–15 tahun yang dapat digunakan untuk melihat indikasi umum dari pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 tahun.

2. Ketenagakerjaan

- a. **Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu.
- b. **Pekerja formal adalah** penduduk yang bekerja dengan status/kedudukan pekerjaannya berusaha dengan dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau sebagai buruh/karyawan/pegawai.
- c. **Pekerja informal** adalah penduduk yang bekerja dengan status/kedudukan pekerjaannya sebagai berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak dibayar/tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, pekerja tidak dibayar.
- d. **Pekerja pertanian** adalah penduduk yang bekerja di lapangan usaha pertanian. Pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pertanian lainnya.

3. Kesehatan

- a. **Imunisasi atau vaksinasi** adalah memasukkan kuman atau racun penyakit tertentu yang sudah dilemahkan (vaksin) ke dalam tubuh bayi di bawah lima tahun (balita) dengan cara disuntik atau diminum (diteteskan ke dalam mulut), dengan maksud agar terjadi kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Jenis imunisasi yang diberikan mencakup BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis-B.
- b. Salah satu jenis pelayanan kesehatan yang akan sangat berpengaruh pada kesehatan ibu dan bayi adalah **pelayanan proses persalinan**. Keberhasilan proses persalinan sangat tergantung kepada petugas atau tenaga penolong yang

menanganinya. Persalinan yang aman dapat dilakukan oleh dokter atau bidan. Oleh karena itu, data mengenai penolong kelahiran dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan dalam publikasi ini adalah dokter atau bidan atau tenaga paramedis lain.

c. Alat atau cara Keluarga Berencana (KB)

- 1) Medis Operasi Wanita (MOW)/sterilisasi wanita/tubektomi
- 2) Medis Operasi Pria (MOP)/sterilisasi pria/vasektomi
- 3) AKDR (Alat Kontrasepsi dalam rahim)/IUD/Spiral
- 4) Suntikan KB
- 5) Susuk KB/norplan/implanon/alwalit (alat kontrasepsi bawah kulit)
- 6) Pil KB
- 7) Kondom/karet KB
- 8) Intravag/tissue/kondom wanita
- 9) Alat/cara KB tradisional, antara lain : pantang berkala/sistem kalender, senggama terputus, tidak campur (puasa), jamu ,urut.

4. Pengeluaran Perkapita Perbulan

Pengeluaran perkapita perbulan untuk makanan adalah rata-rata pengeluaran makanan rumah tangga per bulan dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga.

5. Fasilitas Perumahan

- a. **Luas lantai bangunan** adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap). Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (hamparan semen) dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung). Untuk bangunan bertingkat, luas lantai adalah jumlah luas dari semua tingkat yang ditempati.

Departemen Kesehatan menyatakan bahwa sebuah rumah dikategorikan sebagai rumah sehat apabila luas lantai per kapita yang ditempati minimal sebesar 8 m².

Sedangkan Badan Kesehatan Dunia *World Health Organisation* (WHO) menyatakan luas lantai per kapita minimal 10 m².

- b. **Rumah tangga pengguna air bersih** adalah rumah tangga yang menggunakan air minum yang berasal dari air mineral, air leding/PAM, pompa air, sumur atau mata air terlindung (dengan jarak ke penampungan lebih dari 10 meter).
- c. **Jamban** adalah fasilitas tempat pembuangan air besar yang digunakan oleh rumah tangga.

6. Program Pemerintah

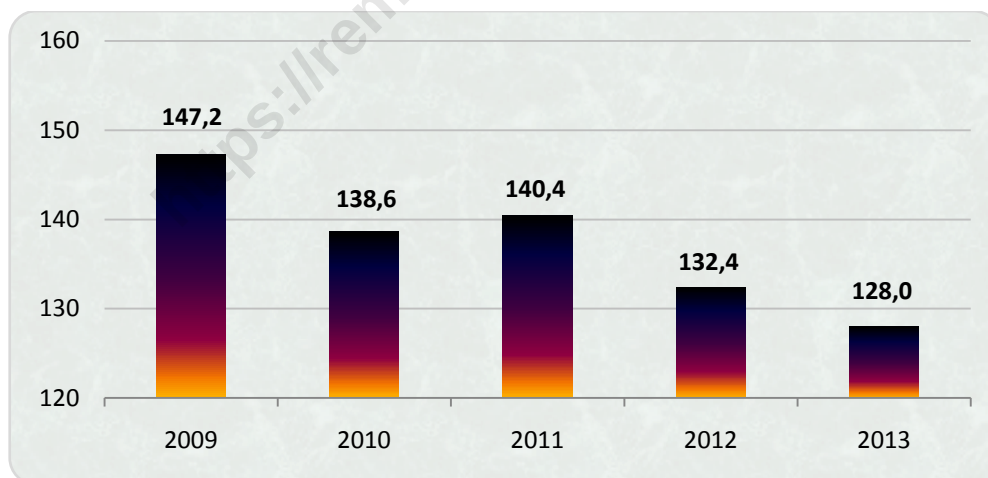
- a. **Jamkesmas/Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin** adalah jaminan pemeliharaan kesehatan bagi orang miskin yang ditandai dengan memiliki kartu kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin. Dahulu program ini bernama **Askeskin/Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin**
- b. **Raskin/Beras untuk Masyarakat Miskin** adalah salah satu program pemerintah untuk rakyat miskin yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) yaitu menjual beras dengan harga murah bersubsidi.
- c. **Rumah tangga Quantile 1** merupakan kelompok rumah tangga yang berada di bawah 20 persen kelompok pengeluaran terbawah.

BAB IV KEMISKINAN DI KABUPATEN REMBANG

4.1. Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Rembang

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang pada periode tahun 2009-2013 terlihat mempunyai kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Pada **Gambar 4.1** terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada periode tahun 2009-2013 cenderung terus mengalami penurunan, yaitu dari 147,2 ribu jiwa menjadi 128 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin sempat mengalami peningkatan pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2010, yaitu dari 138,6 ribu jiwa menjadi 140,4 ribu jiwa.

Gambar 4.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Rembang, 2009-2013 (000 jiwa)

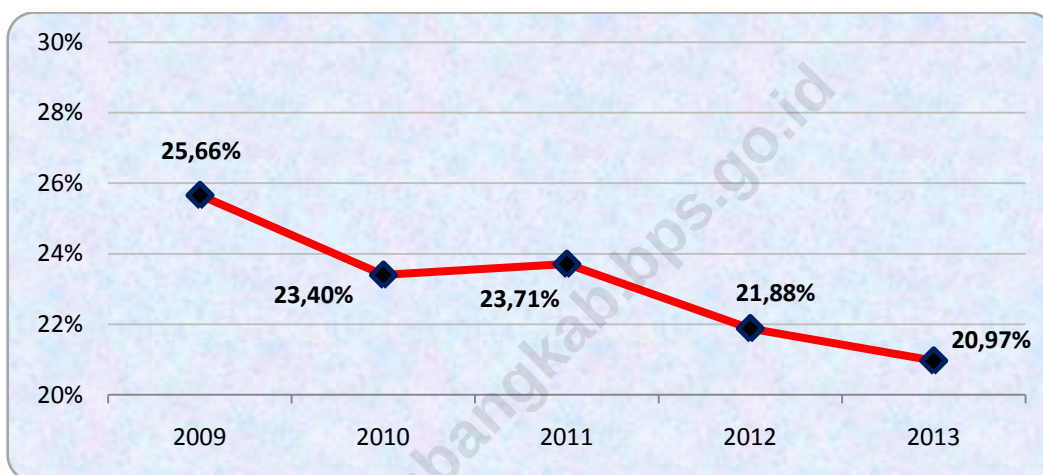


Sumber : Susenas 2009-2013, BPS

Perubahan jumlah penduduk miskin pada periode tahun 2009-2013 berpengaruh juga terhadap persentase penduduk miskin. Pada periode tahun 2009-2013, persentase penduduk miskin di Kabupaten Rembang juga terus mengalami penurunan, yaitu dari 25,66 persen menjadi 20,97 persen. Kondisi tersebut cukup menggembirakan dan memberikan gambaran bahwa program pengentasan

kemiskinan sangat berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tetapi pada tahun 2011 persentase penduduk miskin sempat mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2010, yaitu dari 23,40 persen menjadi 23,71 persen dari jumlah penduduk se-Kabupaten Rembang (**Gambar 4.2**).

Gambar 4.2. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Rembang, 2009-2013



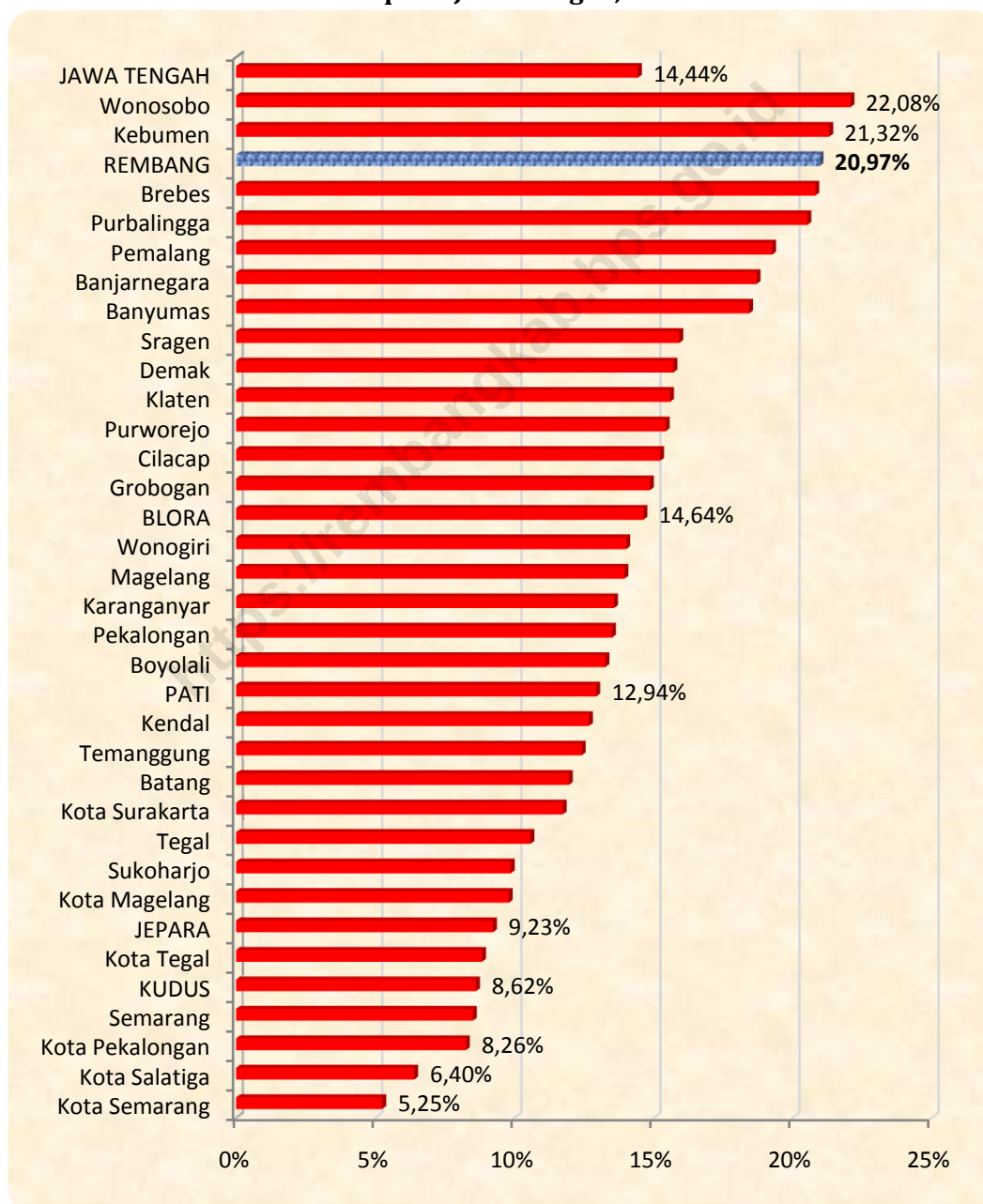
Sumber : Susenas 2009-2013, BPS

Bila dibandingkan menurut kabupaten/kota se-Propinsi Jawa Tengah, persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang (20,97 persen) pada tahun 2013 berada di peringkat 3 (tiga) tertinggi dari 35 kabupaten/kota, setelah Kabupaten Wonosobo (22,08 persen) dan Kabupaten Kebumen (21,32 persen). Sedangkan untuk Propinsi Jawa Tengah, persentase penduduk miskin sebesar 14,44 persen, mengalami penurunan dibandingkan 2012 (14,98 persen).

Pada **Gambar 4.3** terlihat bahwa dari 35 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah, terdapat 15 kabupaten/kota yang persentase penduduk miskinnya lebih tinggi dari angka propinsi, dengan angka tertinggi tercatat pada Kabupaten Wonosobo (22,08 persen), diikuti Kabupaten Kebumen (21,32 persen) dan Kabupaten Rembang (20,97 persen). Kabupaten/kota yang terendah persentase penduduk miskinnya adalah Kota Semarang (5,25 persen), Kota Salatiga (6,40 persen) dan Kota Pekalongan (8,26 persen). Peringkat 3 (tiga) besar yang persentase penduduk miskinnya tertinggi tidak berbeda dengan tahun 2012, tetapi

peringkat tiga besar yang persentase penduduk miskinnya terendah mengalami perubahan. Bila pada tahun 2012 Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Kudus pada posisi satu, dua dan tiga terendah, pada tahun 2013 Kabupaten Kudus ke posisi lima tergeser oleh Kota Pekalongan dan Kabupaten Semarang.

Gambar 4.3. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah, 2013



Sumber : Susenas 2013, BPS

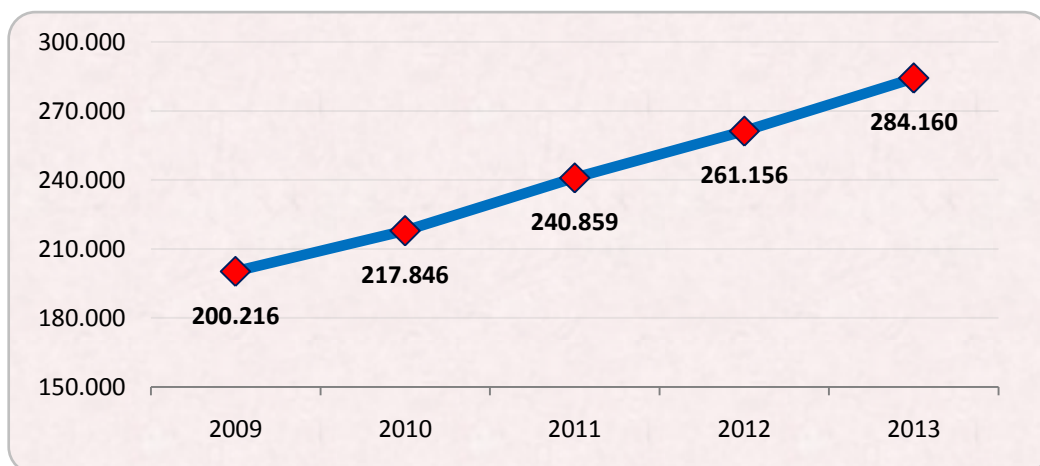
Di wilayah eks-Karesidenan Pati, Kabupaten Rembang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi (20,97 persen) dibanding kabupaten lainnya. Bahkan bila dilihat dari persentasenya, hanya Kabupaten Rembang yang persentase penduduk miskinnya lebih dari 20 persen. Sedangkan persentase penduduk miskin Kabupaten Kudus (8,62 persen) merupakan yang terendah di antara 5 (lima) kabupaten yang berada di wilayah eks Karesidenan Pati. Kabupaten Pati dan Blora memiliki persentase penduduk miskin berkisar antara 12–15 persen.

4.2. Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang

Garis kemiskinan adalah batasan untuk mengetahui miskin atau tidaknya seseorang. Seseorang yang mempunyai pendapatan yang lebih kecil dari garis kemiskinan, maka orang tersebut dikategorikan sebagai orang yang miskin dan sebaliknya.

Perkembangan garis kemiskinan pada periode tahun 2009-2013 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada periode tahun 2009-2013 garis kemiskinan Kabupaten Rembang meningkat sebesar 83.944 rupiah/kapita/bulan, yaitu dari 200.216 rupiah/kapita/bulan pada tahun 2009 menjadi 284.160 rupiah/kapita/bulan pada tahun 2013. (**Gambar 4.4**).

Gambar 4.4. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Rembang, 2009-2013 (Rp)



Sumber : Susenas 2009-2013, BPS

Mencermati **Gambar 4.4**, ternyata garis kemiskinan tidak selalu tetap pada setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena memang trend akan kebutuhan hidup manusia setiap saatnya berubah. Gambar di atas juga bisa diartikan bahwa besarnya konsumsi perkapita per bulan penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2012 maksimal sebesar 261.156,- dan pada tahun 2013 berubah menjadi 284.160,-.

4.3. Ukuran Indeks Kemiskinan di Kabupaten Rembang

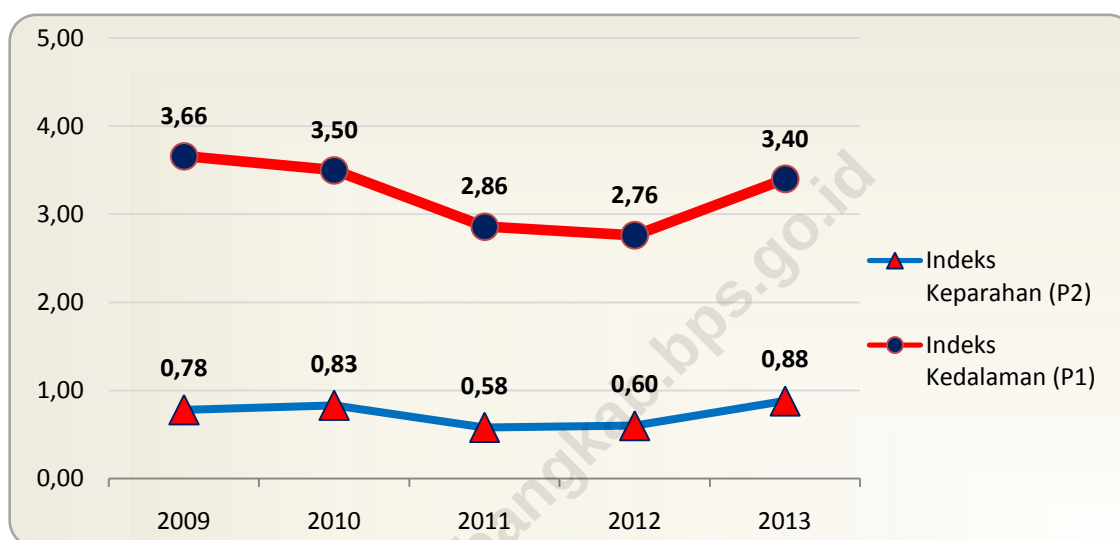
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Tingkat kedalaman kemiskinan diukur dari indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap/P1*), sedangkan tingkat keparahan kemiskinan diukur dari indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity/P2*). Ukuran P1 menunjukkan adanya kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan yang ditetapkan. Semakin tinggi nilainya, maka penduduk miskin ini semakin menjauhi garis kemiskinan tersebut. Sedangkan ukuran P2 menunjukkan adanya penyebaran pengeluaran dari penduduk. Semakin tinggi nilai dari indeks ini, maka diantara penduduk miskin terjadi kesenjangan yang semakin melebar.

Pada periode tahun 2009-2010, indeks kedalaman kemiskinan (P1) menurun sebesar 0,16 poin, yaitu dari 3,66 pada tahun 2009 menjadi 3,50 pada tahun 2010. Setelah itu, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tersebut terus mengalami penurunan hingga menjadi 2,76 (**Gambar 4.5**). Hal tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Rembang antara tahun 2009 hingga tahun 2012 cenderung makin mendekati garis kemiskinan, yang berarti ada perbaikan pada perekonomian penduduk miskin. Tetapi pada tahun 2013 perekonomian penduduk miskin justru mengalami penurunan. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 0,64 poin, hingga menjadi 3,40, yang

berarti pada tahun 2013 rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Rembang kembali menjauhi garis kemiskinan.

Gambar 4.5. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Rembang, 2009-2013



Sumber : Susenas 2009-2013, BPS

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode tahun 2009-2010 mengalami sedikit peningkatan, yaitu sebesar 0,05 poin, yaitu dari 0,78 menjadi 0,83. Tetapi pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 0,58 dan meningkat lagi menjadi 0,60 pada tahun 2012, atau hanya mengalami kenaikan sebesar 0,02 poin. Bahkan pada tahun 2013 naik menjadi 0,88, atau meningkat 0,28 poin bila dibandingkan tahun 2012 (**Gambar 4.5**). Meskipun perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode tahun 2009-2013 tersebut mengalami fluktuasi, tetapi cenderung menunjukkan adanya peningkatan. Naiknya Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Rembang semakin melebar.

BAB V

KARAKTERISTIK PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN REMBANG

5.1. Pendidikan

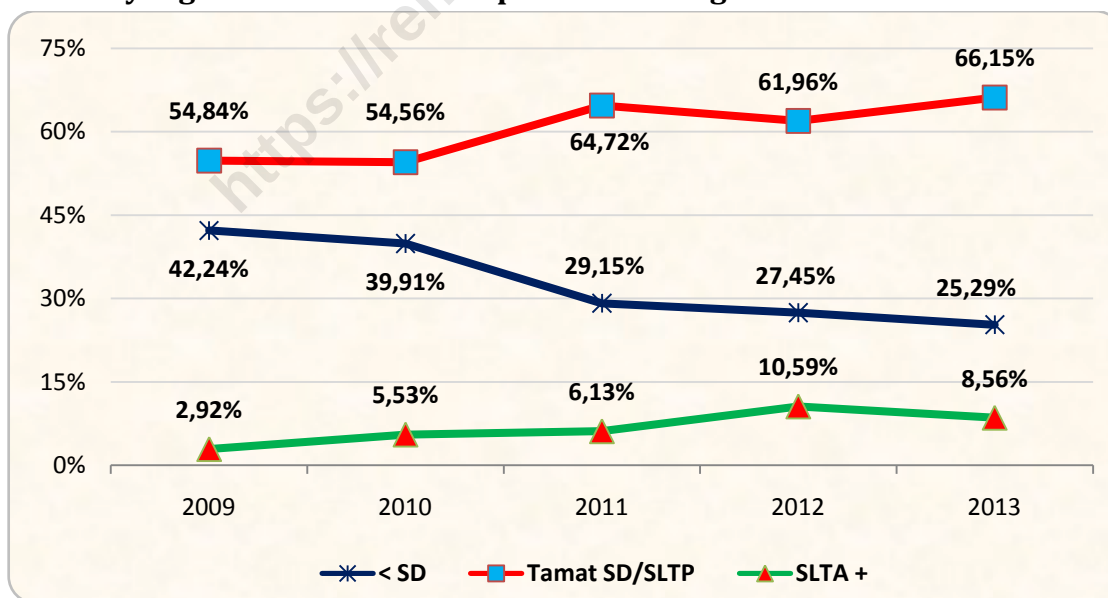
Hubungan antara kemiskinan dan pendidikan sangat penting, karena pendidikan sangat berperan dalam mempengaruhi angka kemiskinan. Orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan mempunyai peluang yang relative kecil untuk menjadi miskin. Peningkatan kualitas SDM bertitik tolak pada upaya pembangunan bidang pendidikan. Melalui pendidikan diharapkan akan terbentuk SDM yang berkualitas bagi pembangunan. Sejak tahun 1970-an pemerintah Indonesia mulai memperlihatkan perhatiannya secara lebih terencana terhadap bidang pendidikan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengembangkan pendidikan di Indonesia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Demikian pula partisipasi masyarakat dalam pendidikan terus meningkat. Kesemuanya itu berangkat dari kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Bagi pemerintah keuntungan yang akan diperoleh dari investasi di bidang pendidikan antara lain bahwa pendidikan merupakan salah satu cara dalam rangka memerangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan bagi masyarakat, pendidikan yang semakin baik merupakan modal dalam memperebutkan kesempatan kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan mereka.

Untuk memperoleh gambaran pembangunan pendidikan di Kabupaten Rembang, khususnya yang berkaitan dengan kesempatan pendidikan yang telah dirasakan oleh masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator pendidikan seperti pendidikan tertinggi yang ditamatkan, Angka Melek Huruf (AMH), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Selama kurun waktu tahun 2009-2013, persentase penduduk miskin yang tidak tamat SD di Kabupaten Rembang terus mengalami penurunan, yaitu dari 42,24 persen menjadi 25,29 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Kabupaten Rembang dalam bidang pendidikan dasar meningkat, didukung dengan program BOS dan BSM dari pemerintah. Selain itu, Pemerintah juga terus berkomitmen dalam menjalankan program Wajib Belajar 9 tahun, Sehingga penduduk yang tamat SD dan SLTP pada periode tahun 2009-2013 meningkat dari 54,84 persen menjadi 66,15 persen, meskipun pada tahun 2010 dan 2012 sempat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan persentase penduduk yang tamat SLTA ke atas, terus mengalami peningkatan dari 2,92 persen pada tahun 2009 menjadi 10,59 persen pada tahun 2012 (**Gambar 5.1**). Tetapi pada tahun 2013 persentase penduduk yang tamat SLTA ke atas mengalami penurunan, yaitu menjadi 8,56 persen.

Gambar 5.1. Persentase Penduduk Miskin Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Rembang Tahun 2009–2013

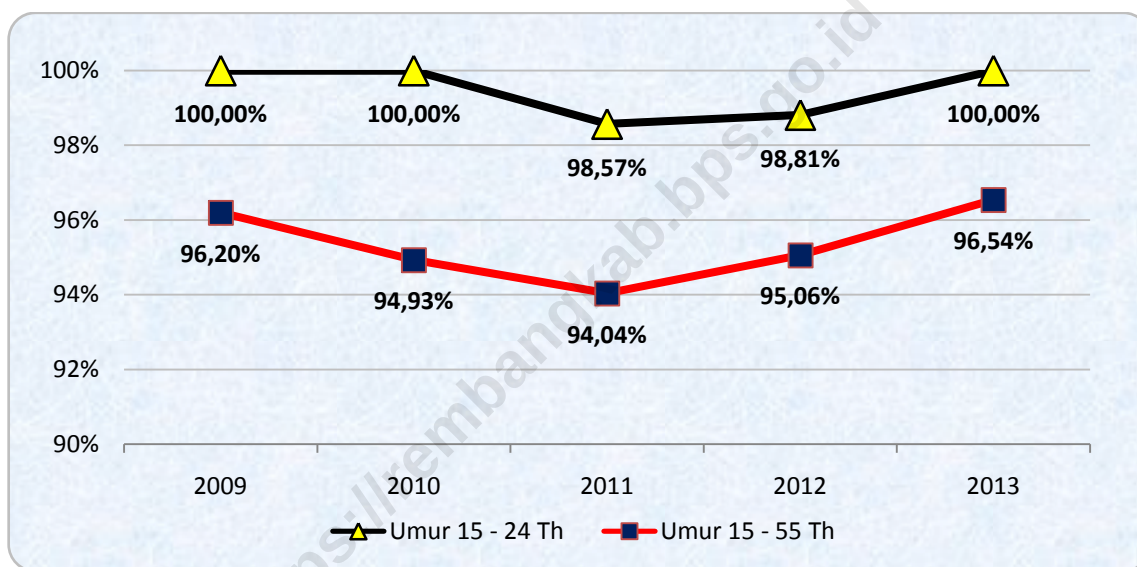


Sumber : Susenas 2009–2013, BPS

Angka Melek Huruf (AMH) penduduk miskin kelompok umur 15–55 tahun di Kabupaten Rembang pada tahun 2013 meningkat dibandingkan tahun 2012. Hal yang sama terjadi pada kelompok umur 15–24 tahun. Pada penduduk miskin

kelompok umur 15–55 tahun, AMH tahun 2013 tercatat sebesar 96,54 persen. Angka tersebut meningkat dari tahun 2012 yang tercatat sebesar 95,06 persen. Sedangkan pada penduduk miskin kelompok umur 15–24 tahun, AMH tahun 2013 tercatat sebesar 100 persen. Angka tersebut meningkat dari tahun 2012 yang tercatat sebesar 98,81 persen. (Gambar 5.2).

Gambar 5.2. Angka Melek Huruf Penduduk Miskin Kelompok Umur 15–24 Tahun dan 15–55 Tahun di Kabupaten Rembang Tahun 2009–2013

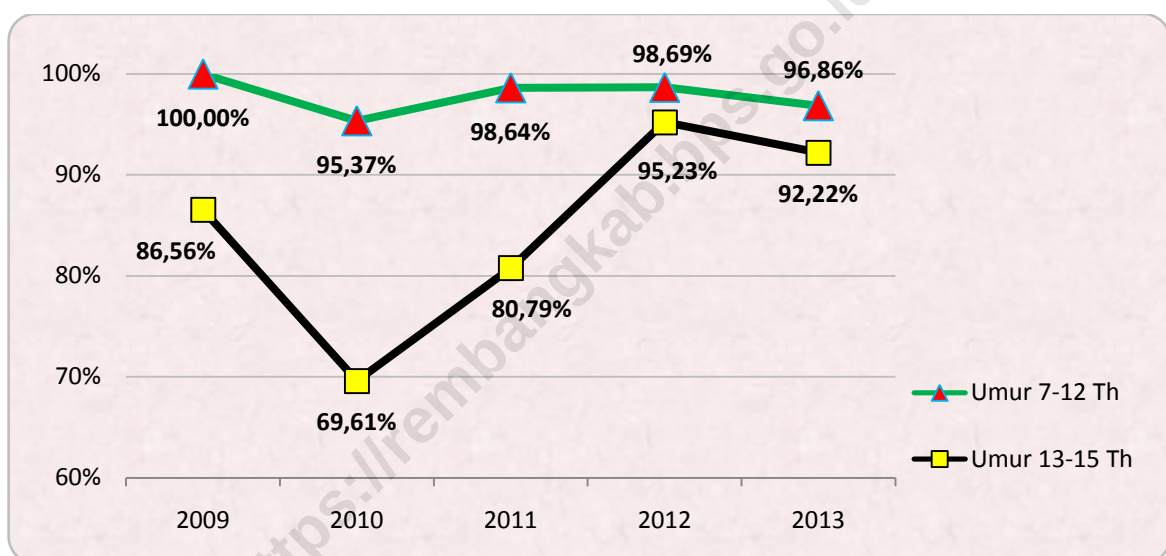


Sumber : Susenas 2009–2013, BPS

Indikator pendidikan lain adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Pada 2013 APS penduduk miskin pada kelompok usia 7–12 tahun mencapai 96,86 persen, menurun dari tahun 2012 yang tercatat sebesar 98,69 persen. Hal yang sama terjadi pada APS penduduk miskin kelompok usia 13–15 tahun, menurun dari 95,23 persen pada tahun 2012 menjadi 92,22 persen pada tahun 2013. Penurunan tersebut dimungkinkan dengan adanya kenaikan harga bensin premium dan solar yang terjadi pada akhir Juni 2013, bersamaan dengan tahun ajaran baru sekolah maupun pendaftaran siswa baru. Pada saat tahun ajaran baru sekolah maupun pendaftaran siswa baru tersebut, orang tua/wali murid membutuhkan dana untuk membeli seragam dan perlengkapan sekolah (tas, sepatu, buku tulis dan sebagainya) dari biaya sendiri. Hal tersebut menyebabkan orang tua murid dari

kalangan miskin enggan menyekolahkan anaknya setelah untuk masuk SD maupun SLTP, meskipun sudah ada program BOS maupun BSM. Sedangkan rendahnya APS kelompok umur 13–15 tahun pada tahun 2010 (69,61 persen) kemungkinan disebabkan adanya kenaikan standar nilai ujian akhir nasional (UAN) yang dapat menentukan lulus tidaknya murid dari SD (**Gambar 5.3**).

Gambar 5.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Miskin Menurut Golongan Umur di Kabupaten Rembang Tahun 2009–2013



Sumber : Susenas 2009–2013, BPS

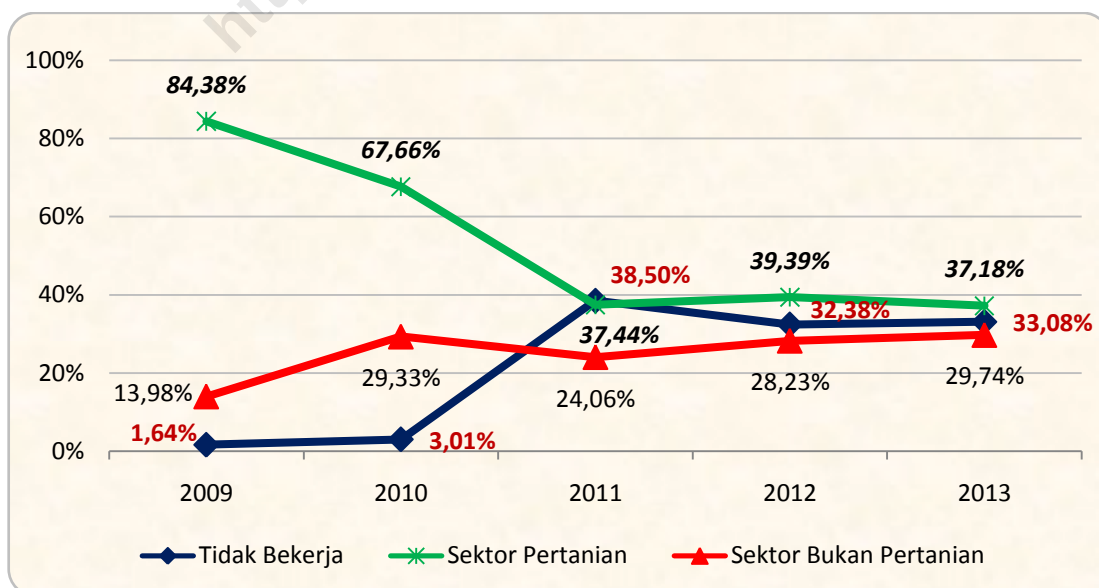
5.2. Ketenagakerjaan

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat berperan penting dalam pembangunan suatu negara. Persaingan di dunia ketenagakerjaan tidak dapat dihindarkan, karena mereka yang memiliki kualifikasi lebih baik tentu akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Fenomena inilah yang tampaknya masih menjadi perhatian pemerintah, yaitu dengan bertambahnya tenaga kerja yang tersedia tidak diikuti oleh makin luasnya lapangan kerja yang akan menampungnya. Pemerataan kesempatan kerja penduduk sangatlah penting karenanya menjadi salah satu sasaran dalam pembangunan. Untuk itu data mengenai indikator ketenagakerjaan sangatlah diperlukan bagi perencanaan di bidang ketenagakerjaan.

Salah satu karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adanya perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin adalah lapangan usaha atau sektor yang menjadi sumber penghasilan utama rumah tangga. Profil orang miskin seringkali melekat dengan penduduk yang bekerja di sektor pertanian, seperti petani gurem, buruh tani dan perkebunan, nelayan, serta pencari kayu dan madu di hutan.

Pada periode tahun 2009–2011, terjadi penurunan yang sangat tajam pada persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian, yaitu dari 84,38 persen menjadi 37,44 persen. Setelah mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2012 (39,39 persen), pada tahun 2013 kembali mengalami penurunan menjadi 37,18 persen. Pada sektor bukan pertanian, setelah menurun pada tahun 2011, persentase penduduk miskin yang bekerja pada sektor ini mengalami peningkatan menjadi 28,23 persen pada tahun 2012, dan meningkat lagi pada tahun 2013 menjadi 29,74 persen. Kedua hal tersebut disebabkan dengan adanya sebagian kecil penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian beralih ke sektor bukan pertanian, dan sebagian kecil lagi justru menjadi pengangguran (**Gambar 5.4**).

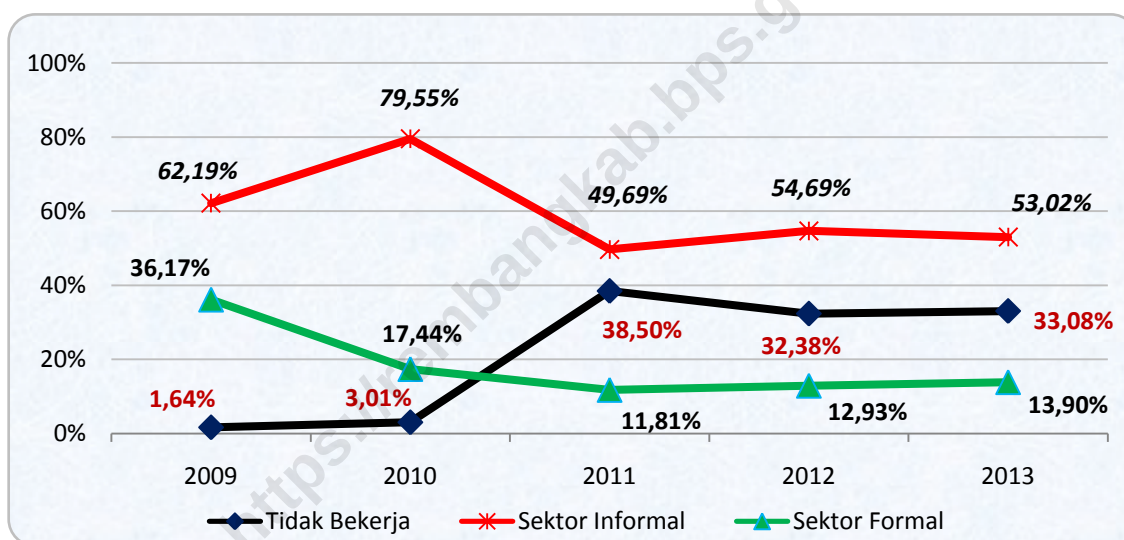
Gambar 5.4. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Pekerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2009–2013



Sumber : Susenas 2009–2013, BPS

Bila melihat status bekerja, pada tahun 2013 persentase penduduk miskin di Kabupaten Rembang yang bekerja di sektor informal mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012 (**Gambar 5.5**). Pada tahun 2013 penduduk miskin yang bekerja di sektor informal sebesar 53,02 persen, berkurang sebesar 1,67 persen dari tahun 2012 (54,69 persen). Sedangkan penduduk miskin yang bekerja di sektor formal sebesar 13,90 persen pada tahun 2013, mengalami kenaikan sekitar satu persen dari tahun 2012 (12,93 persen).

Gambar 5.5. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Bekerja di Kabupaten Rembang Tahun 2009-2013



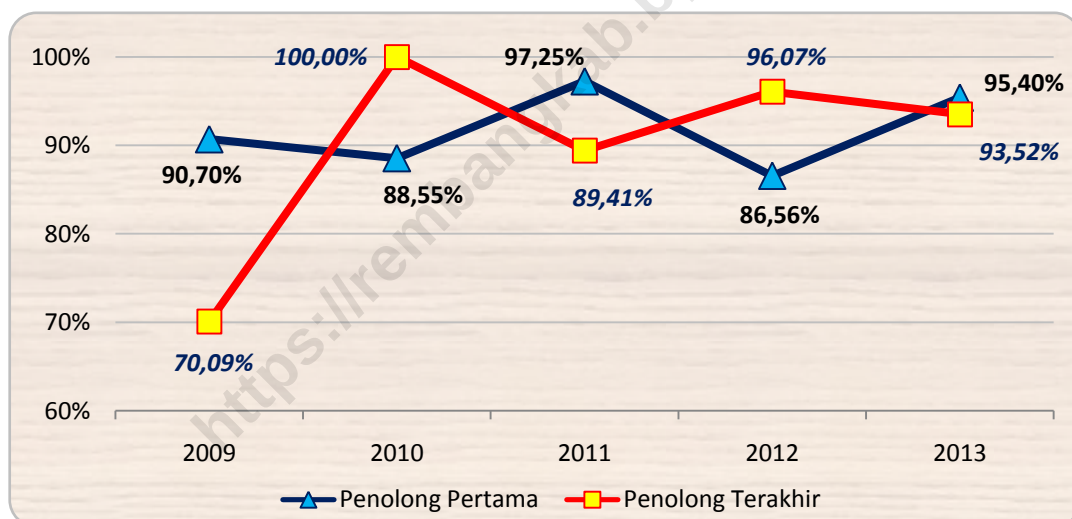
Sumber : Susenas 2009–2013, BPS

5.3. Kesehatan

Salah satu aspek penting ukuran tingkat kesejahteraan rakyat adalah derajat kesehatan penduduk. Derajat kesehatan ini dapat dilihat dari sisi individu, keluarga dan lingkungan. Beberapa indikator kesehatan di tingkat individu adalah seperti penolong persalinan oleh tenaga kesehatan dan pemberian imunisasi pada balita. Penolong kelahiran secara langsung sangat mempengaruhi derajat kesehatan ibu dan anak pada tahun-tahun selanjutnya pasca kelahiran. Dalam proses kelahiran ada dua tahap pertolongan, yaitu tahap awal dan tahap akhir. Tahap awal adalah saat seorang ibu dibawa pertama kali untuk pertolongan kelahiran, sedangkan tahap akhir adalah saat dimana bayi lahir.

Pada periode tahun 2012–2013, perkembangan persentase balita di rumah tangga miskin antara penolong pertama pada proses kelahiran dengan penolong terakhirnya mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Persentase balita di rumah tangga miskin yang penolong pertama proses kelahirannya adalah tenaga kesehatan pada 2013 meningkat sekitar 9 (sembilan) persen dibandingkan tahun 2012. Sebaliknya, persentase balita di rumah tangga miskin yang penolong terakhir proses kelahirannya adalah tenaga kesehatan pada 2013 justru menurun sekitar 2 (dua) persen dibandingkan tahun 2012 (**Gambar 5.6**).

Gambar 5.6. Persentase Balita di Rumah Tangga Miskin yang Proses Kelahirannya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Rembang Tahun 2009-2013

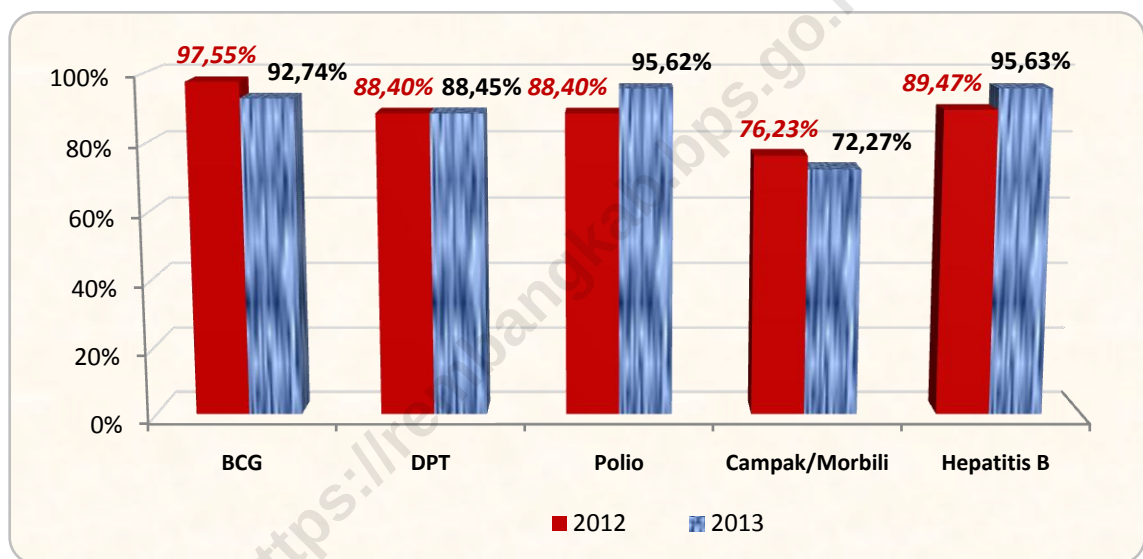


Sumber : Susenas 2009-2013, BPS

Pada usia bayi terdapat beberapa penyakit infeksi yang dapat menimbulkan kematian atau kecacatan, yaitu poliomyelitis, campak, batuk rejan, tetanus, tuberkulosis (TB) dan Hepatitis B. Penyakit-penyakit tersebut dapat dicegah dengan imunisasi dan mempertahankan status gizi yang baik. Pada 2013 persentase balita di rumah tangga miskin yang telah menerima imunisasi BCG, yang diberikan setelah bayi lahir, mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2012. Pada tahun 2013, bayi di rumah tangga miskin yang menerima jenis imunisasi BCG sebesar 92,74 persen, menurun bila dibandingkan tahun 2012 yang besarnya 97,55 persen. Hal yang sama terdapat pada balita yang diberikan jenis imunisasi

campak/morbili, menurun dari 76,23 persen pada tahun 2012 menjadi 72,27 persen pada tahun 2013 (**Gambar 5.7**). Sebaliknya, persentase balita yang diberikan jenis imunisasi Polio dan Hepatitis B mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu sekitar 6–7 persen. Sedangkan persentase balita yang menerima jenis imunisasi DPT mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013, yaitu hanya 0,05 persen.

Gambar 5.7. Persentase Balita di Rumah Tangga Miskin yang Telah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Rembang Tahun 2012-2013



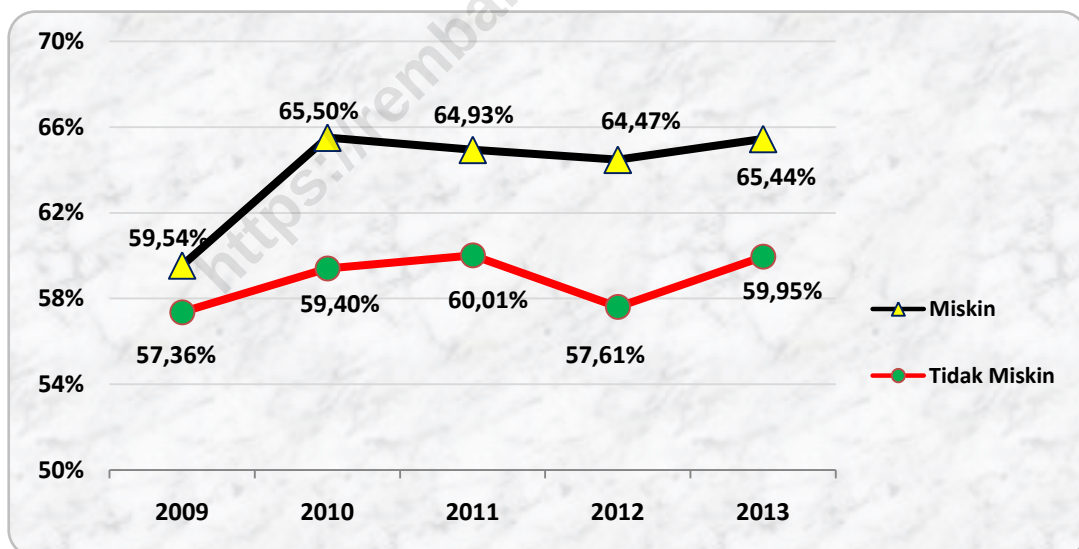
Sumber : Susenas 2012-2013, BPS

BAB VI KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN REMBANG

6.1. Pengeluaran Per Kapita Per Bulan

Sumber penghasilan utama rumah tangga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Cerminan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari status miskin atau tidak miskin suatu rumah tangga yang ditentukan dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan suatu rumah tangga.

Gambar 6.1. Persentase Pengeluaran Per Kapita untuk Makanan Menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Kabupaten Rembang Tahun 2009-2013



Sumber : Susenas 2009-2013, BPS

Pengeluaran penduduk dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pengeluaran untuk membiayai komoditi makanan dan pengeluaran untuk membiayai komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dll). Sebagian besar pengeluaran per kapita per bulan adalah untuk membiayai komoditi makanan. Pada tahun 2013 persentase pengeluaran per kapita per bulan

untuk makanan di Kabupaten Rembang sebesar 61,10 persen, yaitu pada rumah tangga tidak miskin sebesar 59,95 persen dan pada rumah tangga miskin sebesar 65,44 persen (**Gambar 6.1**). Setelah menurun terus persentasenya selama periode tahun 2010-2012, pengeluaran per kapita per bulan untuk makanan pada rumah tangga miskin pada tahun 2013 justru sedikit meningkat. Demikian juga dengan pengeluaran per kapita per bulan untuk makanan pada rumah tangga tidak miskin. Hal tersebut terkait dengan adanya kenaikan harga bahan makanan yang dipicu dengan kenaikan harga bensin premium dan solar, tarif resmi angkutan umum dan tarif dasar listrik sepanjang tahun 2013. Kenaikan harga maupun tarif dari tiga komponen tersebut cukup berpengaruh terhadap kenaikan pengeluaran per kapita per bulan untuk makanan, tidak hanya dirasakan pada rumah tangga miskin saja, tetapi juga rumah tangga tidak miskin di Kabupaten Rembang.

6.2. Fasilitas Perumahan

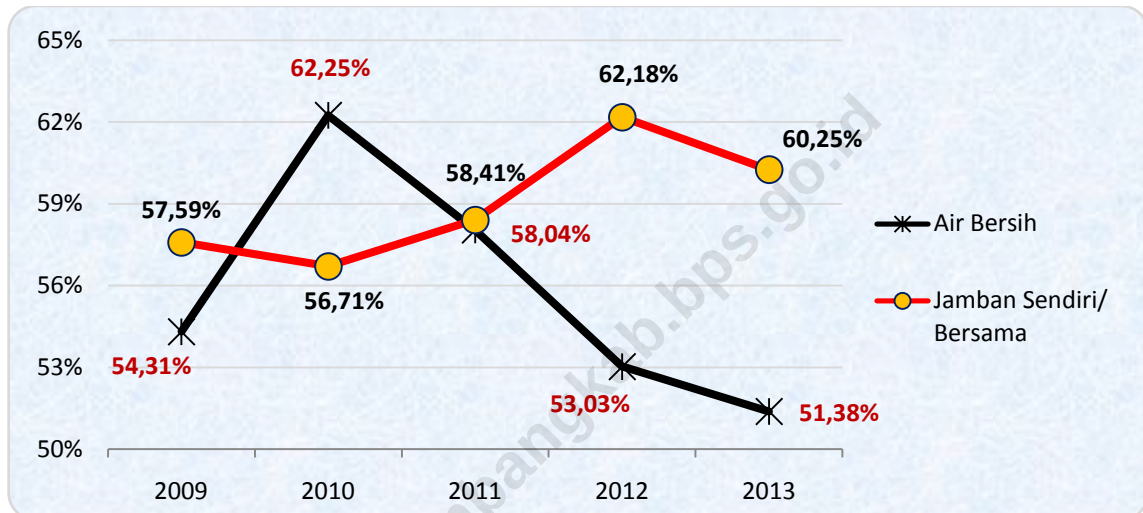
Rumah yang sehat adalah rumah yang memenuhi persyaratan kesehatan. Rumah dan lingkungan yang sehat, tentunya akan berdampak langsung terhadap kesehatan dan kenyamanan seluruh anggota rumah tangga yang menempatinnya. Ada beberapa indikator perumahan yang menunjukkan rumah sehat, antara lain ketersediaan air bersih dan pemakaian jamban.

Ketersediaan fasilitas air bersih sebagai sumber air minum untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga merupakan indikator perumahan yang juga dapat mencirikan sehat tidaknya suatu rumah sebagai tempat tinggal. Ketersediaan air bersih di rumah tangga adalah salah satu indikasi dari kemiskinan. Dilihat dari persentase rumah tangga miskin menurut ketersediaan air bersih sebagai sumber utama, pada periode tahun 2010–2013 terus mengalami penurunan dari 62,25 persen menjadi 51,38 persen (**Gambar 6.2**).

Ketersediaan jamban menjadi salah satu fasilitas rumah sehat yang sangat penting dalam mendukung pola hidup sehat. Disamping ada tidaknya jamban, indikator penggunaan fasilitas jamban juga penting yang dibedakan atas jamban sendiri, jamban bersama dan jamban umum/tidak ada. Rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama di Kabupaten Rembang pada periode tahun

2010-2012 mengalami peningkatan, yaitu dari 56,71 persen menjadi 62,18 persen (**Gambar 6.2**). Tetapi pada tahun 2013, rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama justru menurun.

Gambar 6.2. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Bersih dan Jamban Sendiri/Bersama di Kabupaten Rembang Tahun 2009-2013



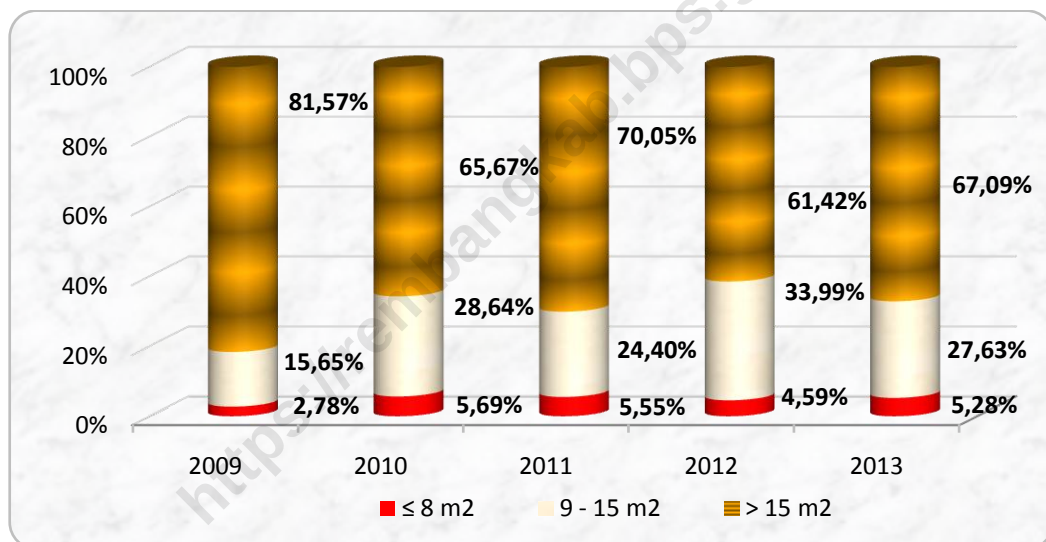
Sumber : Susenas 2009-2013, BPS

Terjadinya penurunan dua indikator perumahan yang menunjukkan rumah sehat pada rumah tangga miskin kemungkinan diakibatkan dengan bertambahnya rumah tangga baru dan termasuk golongan miskin. Mereka menempati rumah yang ketersediaan air bersih dan jambannya belum memadai. Bahkan di wilayah Kabupaten Rembang yang berbatasan langsung dengan pantai, penduduk yang baru menikah dibuatkan rumah oleh orang tuanya dengan cara mengurug tanah di sekitar bibir pantai. Sementara itu, untuk buang air besar (BAB) mereka melakukannya di pantai, sedangkan ketersediaan air bersihnya membeli air secara eceran.

Salah satu indikator perumahan yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga adalah keleluasaan pribadi (*privacy*) dalam tempat tinggal. Keleluasaan pribadi tercermin dari luas lantai rumah per kapita (m^2). Menurut Departemen Kesehatan, salah satu syarat rumah dikatakan sehat adalah luas lantai rumah per kapitanya minimal $8 m^2$. **Gambar 6.3** menyajikan

karakteristik rumah tangga miskin berdasarkan luas lantai per kapita di Kabupaten Rembang. Dilihat dari distribusi rumah tangga miskin menurut kategori luas lantai per kapita, pada periode tahun 2010-2012 persentase rumah tangga miskin yang menempati luas lantai per kapita kurang atau sama dengan 8 m² terus mengalami penurunan dari 5,69 persen menjadi 4,59. Tetapi pada tahun 2013 meningkat lagi menjadi 5,28 persen. Hal ini dimungkinkan dengan adanya pertambahan rumah tangga miskin tanpa adanya perluasan tempat tinggalnya.

Gambar 6.3. Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Luas Lantai Per Kapita di Kabupaten Rembang Tahun 2009-2013



Sumber : Susenas 2009-2013, BPS

6.3. Program Pemerintah

Dalam upaya menanggulangi kemiskinan, pemerintah melakukan berbagai langkah konsolidasi yang diwujudkan dalam 3 (tiga) paket bantuan program untuk penduduk miskin dan hampir miskin.

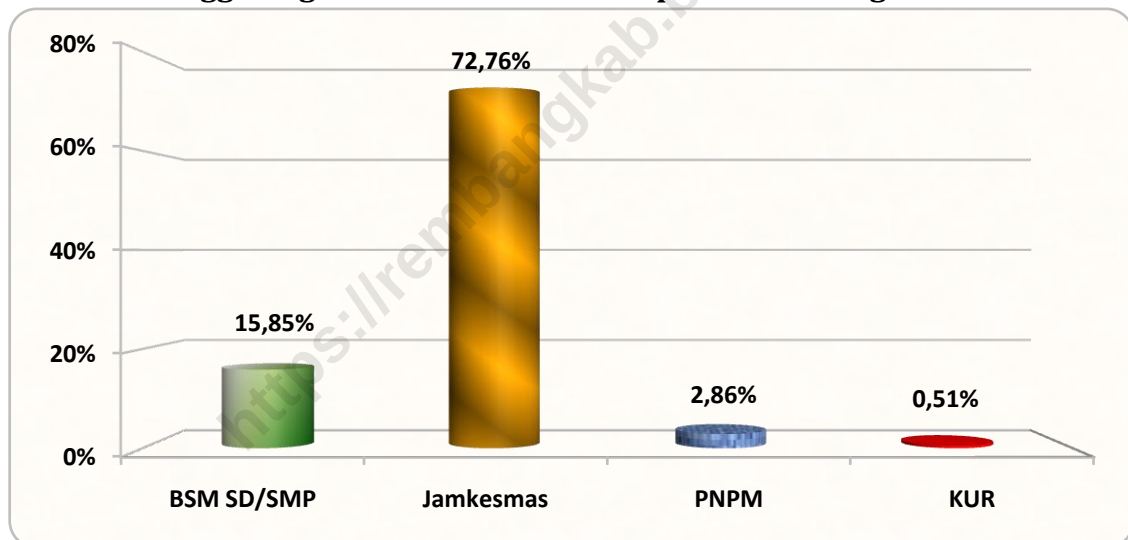
Paket bantuan program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Paket Bantuan Program I : Bantuan dan Perlindungan Sosial yang ditujukan untuk perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, pangan, sanitasi dan air bersih. Paket ini diwujudkan dalam bentuk beras miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas yang dulunya disebut

Askeskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

2. Paket Bantuan Program II : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas berpartisipasi, kesempatan kerja dan berusaha, tanah, Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH), dan perumahan.
3. Paket Bantuan Program III : Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK-KUR) yang bertujuan untuk perlindungan dan pemenuhan hak atas kesempatan berusaha dan bekerja, SDA dan LH.

Gambar 6.4. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Mendapatkan Instrumen Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Rembang Tahun 2013



Sumber : Susenas 2013, BPS

Persentase rumah tangga miskin yang mendapatkan instrument penanggulangan kemiskinan disajikan pada **Gambar 6.4**. Pada tahun 2013, instrumen yang paling banyak diterima rumah tangga miskin di Kabupaten Rembang adalah Jamkesmas, yaitu sebesar 72,76 persen. Selanjutnya adalah instrumen BSM SD/SMP sebesar 15,85 persen, PNPM sebesar 2,86 persen dan KUR sebesar 0,51 persen.

Besarnya perbedaan antara instrumen Jamkesmas dengan instrumen lainnya, karena untuk mendapatkan instrument Jamkesmas tersebut suatu rumah

tangga hanya memenuhi syarat tergolong miskin. Sedangkan untuk mendapatkan instrumen lainnya, selain miskin, mereka harus mempunyai anak yang bersekolah SD/SMP (BSM SD/SMP) dan memiliki usaha (PNPM dan KUR). Bahkan untuk instrumen KUR, ada syarat-syarat tertentu yang harus memenuhi aturan perbankan.

Persentase rumah tangga pada *Quantile* 1 yang pernah membeli Raskin disajikan pada Lampiran **Tabel 12**. Pada tahun 2013 persentase rumah tangga pada *Quantile* 1 yang pernah membeli Raskin sebesar 96,25 persen, meningkat bila dibanding tahun 2012 (95,91 persen). Rata-rata Raskin yang dibeli oleh rumah tangga pada *Quantile* 1 di Kabupaten Rembang tahun 2013 sebanyak 7,23 kg dengan rata-rata harga sebesar Rp. 1.737,- per kg, lebih tinggi daripada tahun 2012 yang rata-rata harganya sebesar Rp. 1.622,- per kg.

BAB VII

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Dari pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

1. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang pada periode 2009–2013 cenderung menurun dari tahun ke tahun, meskipun pada tahun 2011 sedikit mengalami kenaikan.
2. Pada tahun 2013, persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang (20,97 persen) menempati peringkat ketiga dari yang tertinggi, setelah Kabupaten Wonosobo (22,08 persen) dan Kabupaten Kebumen (21,32 persen). Sedangkan di eks-Karesidenan Pati, persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang paling tinggi di antara kabupaten lainnya.
3. Perkembangan garis/batas kemiskinan pada periode 2009–2013 di Kabupaten Rembang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
4. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Rembang pada tahun 2013 meningkat dibandingkan tahun 2012, mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauhi garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P2) mengalami hal yang sama, yang berarti ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin di Kabupaten Rembang sedikit melebar kembali.
5. Pada tahun 2013, persentase penduduk miskin di Kabupaten Rembang yang sudah menyelesaikan pendidikan SLTA ke atas menurun dari tahun sebelumnya, yaitu dari 10,59 persen menjadi 8,56 persen. Angka Melek Huruf (AMH) penduduk miskin mengalami peningkatan, sedangkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk miskin menurun.
6. Persentase penduduk miskin yang tidak bekerja mengalami peningkatan, yaitu dari 32,38 persen pada tahun 2012 menjadi 33,08 persen pada tahun 2013. Penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan, demikian halnya yang bekerja di sektor informal.

7. Pada tahun 2013 kepedulian penduduk miskin sektor kesehatan mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2012. Hal tersebut terjadi pada turunnya persentase balita yang telah diimunisasi dan persentase balita yang penolong terakhir pada proses kelahirannya dibantu tenaga kesehatan.
8. Persentase pengeluaran per kapita per bulan untuk makanan pada rumah tangga miskin pada tahun 2013 sedikit meningkat dari tahun 2012, dari 64,47 persen menjadi 65,44 persen.
9. Pada tahun 2013, persentase rumah tangga miskin yang menggunakan air bersih dan jamban sendiri/bersama menurun bila dibandingkan tahun 2012. Sebaliknya, rumah tangga miskin yang menempati luas lantai per kapita $\leq 8 \text{ m}^2$ justru meningkat.
10. Rumah tangga miskin yang mendapatkan instrumen Jamkesmas sebesar 72,76 persen, BSM SD/SMP sebesar 15,85 persen, PNPM sebesar 2,86 persen dan KUR sebesar 0,51 persen.
11. Pada tahun 2013 persentase rumah tangga pada Quantile 1 yang pernah membeli Raskin sebesar 96,25 persen, meningkat bila dibandingkan tahun 2012 (94,82 persen). Demikian halnya dengan rata-rata Raskin yang dibeli maupun rata-rata harganya.

Kemiskinan di Kabupaten Rembang masih menjadi permasalahan penting yang harus ditangani lebih serius dan memerlukan kepedulian yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Rembang. Terutama bila ada kenaikan harga-harga, seperti yang terjadi pada tahun 2013 tercatat harga bensin premium dan solar, tarif resmi angkutan umum dan tarif dasar listrik mengalami kenaikan. Pada kelompok penduduk berpenghasilan rendah, kenaikan harga ataupun tarif dari 3 (tiga) komponen tersebut cukup berpengaruh. Hal demikian terlihat pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang semakin tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Pengaruh dari kenaikan harga-harga tersebut terhadap kaum miskin juga terlihat pada beberapa indikator pendidikan dan kesehatan. Sektor ketenagakerjaan juga mengalami dampaknya, hingga pada pola konsumsi

penduduk miskin. Oleh karena itu, diperlukan program jangka pendek dan jangka panjang yang cerdas dan bernas dari semua unsur pemerintahan yang ada. Selain itu, penduduk miskin yang paling terkena dampak dari kenaikan harga-harga juga perlu disadarkan, diikutsertakan dan diberdayakan dalam berbagai program pengentasan kemiskinan.

<https://rembangkab.bps.go.id>

LAMPIRAN TABEL-TABEL

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahane Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan Kabupaten Rembang, 2007 - 2013

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahane Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2007	174,3	30,71	4,83	1,18	163.449
2008	154,7	27,21	5,48	1,43	172.010
2009	147,2	25,66	3,66	0,78	200.216
2010	138,6	23,40	3,50	0,83	217.846
2011	140,4	23,71	2,86	0,58	240.859
2012	132,4 ^{*)}	21,88	2,76	0,60	261.156
2013	128,0	20,97	3,40	0,88	284.160

Sumber : Susenas 2007 – 2013, BPS

Keterangan : ^{)} Susenas 2012 dengan penimbang hasil proyeksi penduduk*

Tabel 2. Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Rembang, 2007 - 2013

Tahun	Pendidikan			Total
	< SD	Tamat SD/SLTP	SLTA+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2007	49,20	46,67	4,13	100,00
2008	35,03	58,99	5,98	100,00
2009	42,24	54,84	2,92	100,00
2010	39,91	54,56	5,53	100,00
2011	29,15	64,72	6,13	100,00
2012	27,45	61,96	10,59	100,00
2013	25,29	66,15	8,56	100,00

Sumber : Susenas 2007 – 2013, BPS

Tabel 3. Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Menurut Golongan Umur di Kabupaten Rembang, 2007 - 2013

Tahun	Angka Melek Huruf		Angka Partisipasi Sekolah	
	15 – 24 Tahun	15-55 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2007	99,30	94,36	98,57	92,59
2008	99,73	95,01	99,26	92,53
2009	100,00	96,20	100,00	86,56
2010	100,00	94,93	95,37	69,61
2011	98,57	94,04	98,64	80,79
2012	98,81	95,06	98,69	95,23
2013	100,00	96,54	96,86	92,22

Sumber : Susenas 2007 – 2013, BPS

Tabel 4. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Sektor Bekerja di Kabupaten Rembang, 2007 - 2013

Tahun	Status Bekerja			Total
	Tidak Bekerja	Bekerja di Sektor Pertanian	Bekerja di Sektor Bukan Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2007	3,80	59,94	36,26	100,00
2008	1,41	61,00	37,59	100,00
2009	1,64	84,38	13,98	100,00
2010	3,01	67,66	29,33	100,00
2011	38,50	37,44	24,06	100,00
2012	32,38	39,39	28,23	100,00
2013	33,08	37,18	29,74	100,00

Sumber : Susenas 2007 – 2013, BPS

Tabel 5. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja di Kabupaten Rembang, 2007 – 2013

Tahun	Status Bekerja			Total
	Tidak Bekerja	Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di Sektor Formal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2007	3,80	75,98	20,22	100,00
2008	1,41	85,41	13,18	100,00
2009	1,64	62,19	36,17	100,00
2010	3,01	79,55	17,44	100,00
2011	38,50	49,69	11,81	100,00
2012	32,38	54,69	12,93	100,00
2013	33,08	53,02	13,90	100,00

Sumber : Susenas 2007 – 2013, BPS

Tabel 6. Persentase Perempuan Penggunaan Alat KB dan Persentase Balita di Rumah Tangga Miskin yang Proses Kelahirannya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Rembang, 2007 - 2013

Tahun	Persentase Pengguna Alat KB	% Penolong Pertama Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	% Penolong Terakhir Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
(1)	(2)	(3)	(4)
2007	75,11	83,78	71,18
2008	78,91	89,38	71,82
2009	91,45	90,70	70,09
2010	65,01	88,55	100,00
2011	70,27	97,25	89,41
2012	70,39	86,56	96,07
2013	72,73	95,40	93,52

Sumber : Susenas 2007 – 2013, BPS

Tabel 7. Persentase Balita di Rumah Tangga Miskin yang Telah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Rembang, 2007 – 2013

Tahun	Jenis Imunisasi				
	BCG	DPT	Polio	Campak/ Morbili	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2007	94,28	94,35	95,49	88,32	89,13
2008	92,03	88,10	88,63	74,46	81,70
2009	96,58	89,92	89,92	74,71	87,45
2010	97,90	94,27	94,27	78,80	88,15
2011	100,00	97,25	97,25	81,57	94,01
2012	97,55	88,40	88,40	76,23	89,47
2013	92,74	88,45	95,62	72,27	95,63

Sumber : Susenas 2007 – 2013, BPS

**Tabel 8. Persentase Pengeluaran Per Kapita untuk Makanan
di Kabupaten Rembang, 2007 - 2013**

Tahun	Miskin	Tidak Miskin	Miskin dan Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2007	69,03	59,77	61,33
2008	64,28	57,74	59,52
2009	59,54	57,36	65,78
2010	65,50	59,40	60,83
2011	64,93	60,01	61,18
2012	64,47	57,61	59,11
2013	65,44	59,95	61,10

Sumber : Susenas 2007 – 2013, BPS

**Tabel 9. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih
di Kabupaten Rembang, 2007 - 2013**

Tahun	Miskin	Tidak Miskin	Miskin dan Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2007	38,01	52,12	48,68
2008	57,70	59,80	59,23
2009	54,31	52,20	52,71
2010	62,25	61,05	61,28
2011	58,04	61,07	60,44
2012	53,03	61,16	59,66
2013	51,38	70,36	66,86

Sumber : Susenas 2007 – 2013, BPS

Tabel 10. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama di Kabupaten Rembang, 2007 – 2013

Tahun	Miskin	Tidak Miskin	Miskin dan Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2007	50,66	60,75	58,29
2008	60,48	64,42	60,48
2009	57,59	70,18	67,62
2010	56,71	68,34	66,09
2011	58,41	67,37	65,50
2012	62,18	72,21	70,36
2013	60,25	83,58	79,28

Sumber : Susenas 2007 – 2013, BPS

Tabel 11. Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Luas Lantai Perkapita di Kabupaten Rembang, 2009 - 2013

Tahun	Luas Lantai per Kapita		
	≤ 8	9 - 15	> 15
(1)	(2)	(3)	(4)
2009	2,78	15,65	81,57
2010	5,69	28,64	65,67
2011	5,55	24,40	70,05
2012	4,59	33,99	61,42
2013	5,28	27,63	67,09

Sumber : Susenas 2009 – 2013, BPS

Tabel 12. Persentase Rumah Tangga yang Pernah Membeli Beras Raskin, Rata-Rata Jumlah Beras Raskin dan Harga yang Dibeli oleh Rumah Tangga pada Quantile 1 di Kabupaten Rembang, 2008 - 2013

Tahun	Rumah Tangga Penerima Raskin (%)	Rata-rata Raskin (kg)	Rata-rata Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2008	100,00	7,63	1.644
2009	98,66	6,73	1.626
2010	98,82	5,29	1.617
2011	94,82	5,76	1.677
2012	95,91	6,71	1.622
2013	96,25	7,23	1.737

Sumber : Susenas 2008 – 2013, BPS

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS), 2009, *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2009*, Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2012. *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 2013) Pedoman Pencacahan Kor*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2012. *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 2013) Pedoman Pencacahan Modul Konsumsi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik (BPS), 2014, *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2013*, Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah, 2014. *Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 2013*. Semarang : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah, 2014. *Data dan Informasi Kemiskinan Jawa Tengah 2008-2012*. Semarang : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, 2014. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Rembang 2012*. Rembang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang.

<http://jateng.bps.go.id>

<http://bisnis.liputan6.com/read/626520/kenaikan-harga-bertubi-tubi-inflasi-bakal-sentuh-7-di-juli-2013>

<http://www.instalasilistrikrumah.com/kenaikan-tarif-listrik-per-3-bulan-tahun-2013>

<https://www.google.com/search?q=gambar+miskin&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=sb>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

*Publikasi ini menyajikan gambaran tentang
kemiskinan penduduk dan rumah tangga
Kabupaten Rembang pada tahun 2013*

Cakupan publikasi ini meliputi :

- ❖ *Perkembangan Kemiskinan*
- ❖ *Karakteristik Penduduk Miskin*
- ❖ *Karakteristik Rumah Tangga Miskin*

*Data dan Informasi Kemiskinan
Kabupaten Rembang 2013
disiapkan oleh Seksi Statistik Sosial
BPS Kabupaten Rembang.
Informasi lebih lanjut
Telp. (0295) 691040
Email : bps3317@bps.go.id.*



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN REMBANG**
Jl. Pemuda Km. 1 Rembang, 59218
Telp. dan Faks. (0295) 691040
Situs web : <http://rembangkab.bps.go.id>
Email : bps3317@bps.go.id

